

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan majalah *National Corporate Social Responsibility Asean* (NCSRA) tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke 4 di negara ASEAN. Indonesia mendapatkan skor 47,7 atas kualitas pengungkapan CSR disusul Malaysia 48,4, Singapura 48,8 dan urutan pertama ada Thailand dengan skor 56,8. Penilaian kualitas pengungkapan CSR tersebut berdasarkan penilaian atas pemenuhan 4 indikator CSR oleh perusahaan.

Berdasarkan data NCSRA tingkat pengungkapan CSR di Indonesia berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) dalam hal indikator lingkungan Indonesia mendapatkan penilaian 31,4%, dalam hal indikator sosial Indonesia mendapatkan penilaian 41,9%, dalam hal indikator ekonomi Indonesia mendapatkan penilaian 48,0% dan dalam hal indikator pemerintahan Indonesia mendapatkan penilaian 60,7%.

Melihat dari hasil penilaian yang diperoleh oleh Indonesia tersebut menunjukkan tingkat kualitas pengungkapan CSR masih rendah dalam indikator ekonomi, sosial, terutama dalam indikator lingkungan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Implementasi praktik CSR dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia masih banyak mengalami kendala.

Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja saat operasional perusahaan pada 2015 ada 110.285 kasus, pada 2016 ada 105.182 kasus dan pada 2017 ada 80.392 kasus, 50 persen jumlah kecelakaan kerja terjadi pada perusahaan pertambangan, setiap hari terjadi 68 kasus kecelakaan

kerja. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2016 ledakan di kawasan industri nikel Morowali yang menewaskan seorang pekerja asal tiongkok Haiwei.

Pada saat kejadian korban mendapatkan tugas mengambil cat di dalam peti kontainer dengan melubangi peti menggunakan las, pada saat melubangi tiba tiba kontainer meledak dan menimpa korban. Menurut Direktur Jatim Sulteng, Syahrudin Arietal Douw mengatakan kecelakaan yang terjadi pada ledakan di industri nikel tersebut karena standar keselamatan kerja yang rendah di industri tersebut sehingga memakan korban jiwa.

Kasus korupsi marak terjadi di Indonesia. Data dari Transparency International Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia mendapatkan skor 3,4 pada tahun 2016. Kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi pada perusahaan milik negara (BUMN). Terdapat kasus korupsi yang terjadi pada Pertamina yang menyelewengkan dana csr untuk kepentingan pribadi.

Bareskrim memeriksa mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono perihal penyelewengan dana csr periode 2012-2014. Nina Nurlina Pramono diduga menyelewengkan dana csr sebesar Rp 256 miliar untuk program csr gerakan menabung 100 juta pohon, sekolah sepak bola Pertamina dan beasiswa Sobat Bumi. Modus penyelewengan dana csr tersebut adalah distribusi dana csr dengan menggunakan lokasi dan relawan fiktif.

Kasus pencemaran lingkungan merupakan masalah yang terparah di Indonesia hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana yang disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah industri. Menurut data KLHK dan Kementerian Perindustrian pada tahun 2016 jumlah limbah B3 di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun, sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu mencapai 66,31 juta ton.

Pembuangan sisa limbah B3 industri tersebut terbesar berasal dari perusahaan pertambangan, energi dan Mineral. Hampir sekitar 70 persen pencemaran lingkungan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas operasi pertambangan, energi dan mineral dengan 16 titik lebih kawasan pesisir laut menjadi tempat pembuangan limbah perusahaan pertambangan. Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan Bara Adhiparma,tbk yang mencemari daerah aliran sungai Desa Penanding Provinsi Bengkulu Tengah

Pembuangan limbah produksi batubara ke hulu air sungai yang membuat air di sungai tersebut berubah menjadi hitam pekat sehingga ikan yang hidup di sungai tersebut mati dan air dari sungai tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Pencemaran lingkungan ini terjadi karena pengelolaan limbah produksi yang buruk dari perusahaan Bara Adiparma yang tidak sesuai dengan standar sistem manajemen lingkungan, Seharusnya perusahaan tidak membuang ke sungai.

Kinerja manajemen perusahaan dikatakan baik jika target profit yang ditentukan tercapai. Laba merupakan hasil dari penjualan dan pendapatan investasi suatu perusahaan. Rasio *profitabilitas* mencerminkan efektivitas manajemen suatu perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan menunjukkan semakin efektivitas kinerja manajemen perusahaan.

Pertumbuhan positif profit yang diperoleh perusahaan akan memotivasi manajemen perusahaan untuk lebih mengungkapkan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat untuk meningkatkan citra perusahaan. Semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan memberikan kekuatan kepada manajemen perusahaan dalam hal keuangan untuk membiayai semua program sosial yang telah direncanakan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian Arifin (2018), Laksono (2018), Tasya (2016), Zaina (2015), Yuliskayani (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Maharesti (2018), Pratiwi (2016), Hasnia dan Rofingathun (2017), Manuhurung (2017) dan Bawono (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

. Pertumbuhan perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan di masa akan datang dalam persaingan ketat dengan perusahaan lain dalam pasar konsumen. Pertumbuhan perusahaan juga diartikan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan penjualan di masa lalu menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan di masa akan datang (Tasya,2016).

Perusahaan yang bertumbuh merupakan perusahaan yang mengalami peningkatan aktivitas produksi sehingga dampak buruk dari kegiatan produksi tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat besar. Dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar inilah yang akan membuat masyarakat lebih menyoroti setiap aktivitas produksi perusahaan untuk itu dalam mengurangi sorotan publik tersebut perusahaan akan lebih mengungkapkan kegiatan sosialnya guna memperbaiki citra perusahaan.

Beberapa hasil berbeda penelitian tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian Riza (2017) dan Hasnia dan Rofingathun (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan hasil berbeda dari

penelitian Tasya (2016), Widiastuti (2018) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan terhadap para stakeholder perusahaan (Maharesti, 2018). CSR merupakan implikasi dari Good Corporate Governance (GCG). *Corporate Governance* menjelaskan hubungan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan yang dapat menentukan arah kinerja perusahaan (Manuhurung, 2017).

Dewan komisaris merupakan dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham untuk menggantikan peran pemegang saham dalam perusahaan. Dewan komisaris bertugas memberikan pengawasan dan nasehat terhadap dewan direksi sekaligus mempunyai kewenangan dalam mengarahkan strategi bisnis perusahaan. Dewan komisaris dapat memasukkan program CSR sebagai bentuk strategi bisnis perusahaan.

Dewan komisaris bisa memprioritaskan CSR sebagai bentuk strategi bisnis untuk meningkatkan citra perusahaan di mata para stakeholdernya. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Hasil penelitian Solikhah (2016) dan Manuhurung (2017) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh Laksono (2018) dan Arifin (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Dewan direksi merupakan top manajemen dalam perusahaan yang diberikan mandat oleh pemegang saham untuk mengelola dan menjalankan operasional perusahaan. Dewan direksi mempunyai wewenang memutuskan dan menetapkan sebuah kebijakan untuk kelangsungan bisnis perusahaan di masa akan datang. Dewan direksi mempunyai tanggungjawab terhadap kepentingan para stakeholdernya, salah satunya pengungkapan tanggungjawab sosial.

Pengungkapan CSR merupakan strategi manajemen untuk menutupi perilaku oportunistik dewan direksi kepada para stakeholdernya sehingga para stakeholder menilai baik kinerja dewan direksi. Dewan direksi diyakini akan lebih mengungkapkan CSR ketika operasional perusahaan sedang terpuruk untuk mengembalikan citra perusahaan. Hasil penelitian Manuhurung (2017), Solikhah (2016) dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Untuk mendorong agar perusahaan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan operasi perusahaan perlu membentuk komite audit yang bekerja secara profesional dan independen membantu dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan. Keberadaan komite audit akan memberikan kekuatan lebih kepada dewan komisaris bekerja sama menekan dewan direksi untuk lebih mengungkapkan CSR.

Semakin besar ukuran komite audit maka semakin besar tekanan terhadap dewan direksi untuk lebih mengungkapkan CSR. Hasil penelitian Arifin (2018) dan Laksono (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Manuhurung (2017) dan Mustika (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan saham mayoritas oleh institusi diharapkan memberikan pengaruh kepada keputusan manajemen. Kepemilikan saham mayoritas oleh institusi dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen perusahaan sehingga pihak institusi memiliki insentif yang lebih besar memantau tindakan kebijakan manajemen dan keputusan manajemen. Kepemilikan saham oleh institusi juga sebagai pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan.

Kepemilikan saham mayoritas oleh pihak institusi, membuat pihak institusi dapat menetapkan kebijakan yang lebih luas tentang CSR. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh institusi, maka semakin besar juga pengaruh pihak institusi untuk menentukan kebijakan CSR pada sebuah perusahaan.

Hasil penelitian Arifin (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sebaliknya hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Solikhah (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Keprihatinan dunia internasional terhadap peningkatan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat membuat dunia internasional mengeluarkan sebuah standar yang mengatur tentang pembuangan limbah (sisa sampah produksi) perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan. Dunia internasional mengeluarkan sebuah standar yang disebut *International Standardization Organization (ISO) 14001*.

ISO 14001 adalah standar sistem manajemen lingkungan yang secara luas digunakan di seluruh dunia sebagai respon proaktif perusahaan dunia terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah produksi perusahaan untuk

memenuhi tuntutan masyarakat yang menuntut sebuah produk yang ramah lingkungan dan aman untuk dikonsumsi (Dianawati, 2016).

Sertifikat ISO akan diberikan kepada perusahaan yang komitmen dalam mendukung program kelestarian lingkungan. Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISO menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki beban moral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga perusahaan yang bersertifikat ISO diyakini akan lebih mengungkapkan CSR.

Beberapa hasil penelitian yang meneliti tentang pengaruh sertifikasi *ISO 14001* perusahaan terhadap pengungkapan *CSR*. Hasil penelitian Rahmawati (2018), Bawono (2015) menunjukkan bahwa sertifikasi *ISO 14001* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*, Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Dianawati (2016) bahwa sertifikasi lingkungan *ISO 14001* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

Media mempunyai peran vital dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang isu masalah lingkungan dan sosial yang terjadi. Dengan adanya media masyarakat bisa mengetahui segala aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Media dapat menjadi wadah komunikasi perusahaan dalam mengungkapkan program *CSR* yang telah dilakukan perusahaan kepada masyarakat.

Liputan media mengindikasikan bentuk tekanan publik atau bentuk penghargaan publik kepada perusahaan (Widiastuti, 2018). Sorotan publik melalui media terhadap diyakini akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk lebih mengungkapkan *CSR*. Beberapa studi telah meneliti pengaruh liputan media terhadap pengungkapan *CSR*.

Hasil penelitian Maharesti (2018), Solikhah (2016), Pratiwi (2016), dan Widiastuti (2018) yang menyatakan bahwa liputan media tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Hasil berbeda yang didapat dari penelitian Zaina (2015), Yuliskayani (2018), Plorensia (2015), Hasnia dan Rofingathun (2017) dan yang menyatakan bahwa liputan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini memodifikasi penelitian Maharesti (2018) sebagai acuan. Penelitian terdahulu Maharesti meneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan dan media terhadap pengungkapan CSR sedangkan pada penelitian ini menambah variabel sertifikasi lingkungan, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional.

Penambahan variabel dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional pada penelitian ini dikarenakan penelitian sebelumnya variabel corporate governance hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris sedangkan variabel corporate governance yang lain tidak dijelaskan sehingga pengaruh pihak internal perusahaan terhadap pengungkapan CSR tidak dijelaskan.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan dan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan beberapa hasil penelitian Maharesti (2018), Bawono (2015), Laksono (2018), Dianawati (2016), Solikhah (2016), Mustika (2015) penulis tertarik mengambil judul penelitian Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Sertifikasi Lingkungan ISO 14001 dan *Media Exposure* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, sertifikasi ISO 14001, dan media exposure terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan pertambangan periode tahun 2013-2017.

Perusahaan pertambangan dipilih karena 1) perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, 2) perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang menempati urutan tertinggi yang banyak menimbulkan pencemaran lingkungan di Indonesia, 3) praktik kegiatan CSR di perusahaan pertambangan banyak mengalami kendala seperti masalah kecelakaan dan keselamatan pekerja, masalah sosial dengan masyarakat sekitar, dan pencemaran lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan CSR
2. Apa pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap pengungkapan CSR
3. Apa pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR
4. Apa pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan CSR
5. Apa pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan CSR
6. Apa pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan CSR
7. Apa pengaruh Sertifikasi Lingkungan ISO 14001 terhadap pengungkapan CSR

8. Apa pengaruh Media Exposure terhadap pengungkapan CSR

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan CSR
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap pengungkapan CSR
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan CSR
5. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan CSR
6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan CSR
7. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikasi Lingkungan ISO 14001 terhadap pengungkapan CSR
8. Untuk mengetahui pengaruh Media Exposure terhadap pengungkapan CSR

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam menentukan kebijakan program CSR dalam perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan baru tentang faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan *CSR* dalam perusahaan, program *CSR* yang dirancang perusahaan yang dimasukkan dalam strategi bisnis perusahaan sehingga program *CSR* dapat mendukung program keberlanjutan pembangunan nasional.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya dalam menentukan arah kebijakan strategi bisnis khususnya kebijakan *CSR* sehingga *CSR* dapat dijadikan arah strategi bisnis baru yang menjadikan suatu keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis.